

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Fauzie Ridwan, 1982, *Hukum Tanah Adat-Multi disiplin Pembudayaan Pancasila*, Dewaruci Press, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- A.P. Parlindungan, 2002, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Cetakan Kesembilan, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- B.F Sihombing, 2004, *Evolusi Kebijakan Pertahanan dalam Hukum Tanah Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia jilid I Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chomsah, 2002, *Hukum Pertanahan (Pemberi Hak Atas Tanah Negara) Cerakan I*, Prestasi Pustaka. Yogyakarta.
- Florianus, S.P Sangsun, 2008, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, Visi Media, Jakarta.
- I Ketut Oka Setiawan, 2019, *Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Irwandi, 2010, *Pergeseran Hukum Adat Dalam Pemamfaatan Tanah Ulayat Kaum di Kecamatan Banu Hampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat*, Universitas Diponegoro Semarang.
- Jayadi Setiabudi, 2006, *Panduan Lengkap Mengurus Tanah Rumah Serta Segala Perizinannya*, Buku Pintar, Yogyakarta.

- Lembaga Kerapatan Adat Alam Minang Kabau (LKAAM) Sumatera Barat, 2000, *Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minang Kabau*, Padang.
- Mudakir Iskandar, 2019, *Panduan Mengurus Sertifikat dan Penyelesaian Sengketa Tanah*, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Muhammad Bushar, 1983, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Mukmin Zakie, 2013, *Kewenangan Negara Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum di Indonesia dan Malaysia*, Litera, Yogyakarta.
- Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Soeroso, 2006, *Praktek Hukum Acara Perdata (Tata Cara dan Proses Persidangan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sarjita, 2005, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Edisi Kedua, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta.
- Soedharyo Soimin, 2004, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Supriadi, 2009, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Suyud Margono, 2004, *ADR (Alternative Dispute Resoluttion) & Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Titahelu, 2015, *Penetapan Asas-asas Hukum Umum dalam Penggunaan Tanah untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat (Suatu Kajian Filsafati dan Teoretik tentang Pengaturan dan Penggunaan Tanah di Indonesia) Ed. Revisi, Cet. 1*, Deepublish, Yogyakarta.
- Waskito dan Hadi Arnowo, 2019, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1994, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur, Bandung.

Wulansari, Dewi, 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.

Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Perpres Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat.

C. Jurnal

- A.A. Sagung Tri Buana Marwanto, 2017, *Pengaturan Hak Penguasaan Tanah Hak Milik Perorangan Oleh Negara*, Volume 5, Nomor 4.
- Adek Chandra , 2022, *Permasalahan Tanah Ulayat Pasca Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Sumatera Barat*, Jurnal Tunas Agraria, Vol. 5 No. 2.
- Arie Bestary, 2014, *Analisis Yuridis Kelemahan Kriteria Tanah Terlantar Yang Berstatus Hak Milik*, E-Jurnal Gloria Yuris, Volume 2, Nomor 3.
- Bambang Suharto, 2023, *Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*, The Indonesian Journal of Public Administration, Vol. 9, No. 1.
- Mira Novana Ardani, 2019, *Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Pertanahan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kewenangan, Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional*, Administrative Law & Governance Journal, Vol. 2 No. 3, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rahmat Ramadhani, 2021, *Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah*, Jurnal Soisal dan Ekonomi, Vol. 2 No. 1.
- Yofita Sari, 2019, *Evaluasi Berjalan Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kota Padang*, Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), Vol. 1 No. 3.

D. Internet

- <https://langgam.id/kelurahan-limau-manis-pauh-kota-padang/#googlevignette> ,
- https://id.wikipedia.org/wiki/Limau_Manis,_Pauh,_Padang.